

# ANALISIS BELANJA DAERAH YANG DIPENGARUHI DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

*by* Rini Pebriani

---

**Submission date:** 24-Aug-2019 01:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1162920292

**File name:** UNIKOM\_RINIPEBRIANI\_21115071\_ARTIKEL.docx (114.21K)

**Word count:** 3668

**Character count:** 24496

**ANALISIS BELANJA DAERAH YANG DIPENGARUHI DANA PERIMBANGAN DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Studi Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018 )**

**ANALYSIS OF REGIONAL EXPENDITURES INFLUENCED BY BALANCING FUNDS AND  
LOCAL REVENUE**

**(Study On Local Government In West Java Province Period 2016-2018)**

Oleh :

**RINI PEBRIANI - 21115071**

Pembimbing:

**Adi Rachmanto, S.Kom.,M.Kom**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Komputer Indonesia**

**2019**

**Email: [pebrianirini72@gmail.com](mailto:pebrianirini72@gmail.com)**

---

**ABSTRACT**

*The study aims to test the fund of balancing, the indigenous revenue of the area against regional expenditure on district/city in West Java province year 2016-2018 the data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) West Java Province. The problem is the decrease in the original revenue of the area, increasing local spending, declining balance funds and increasing regional expenditure.*

*The method used to use a descriptive analysis of the verificative with the analysis researched is the financial statistics Regency/City of West Java in 2016-2018. Determination of sample using purposive sampling technique which as much as 81 report of realization of acceptance from 27 Regency/city in West Java. The data analysis technique used is multiple linear analysis and is assisted by the application program SPSS version 25.*

*The results of this research show that the Balance fund has significant effect on the expenditure of the district with a positive relationship, the indigenous revenue area is significant to the shopping area with positive relationship.*

**Keywords: Balance fund, indigenous revenue and regional expenditure.**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, salah satu perubahan itu adalah pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal (Andirfa, 2009).

Tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah tersebut dapat berdimensi politik, hukum dan administrasi. Berdimensi politik berkaitan erat dengan jabatan kepala daerah dan hak otonom sesuai ketentuan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Berdimensi hukum berkaitan dengan kewenangan kepala daerah dalam mengesahkan perda APBD bersama dengan DPRD dan peraturan kepala daerah yang dikeluarkan sebagai penjabar dari APBD (Hendra Karianga, 2013:6). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang distujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada era reformasi keuangan daerah, bentuk APBD mengaami perubahan mendasar dan bentuk APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, pembiayaan dan belanja (Abdul Hafidz, 2014:85).

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Halim, 2007:44). Belanja Daerah harus diterapkan secara terukur, rasional sebagai bagian dari penetapan belanja daerah yang sehat, belanja daerah yang sehat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan kebutuhan pemerintah untuk pelayanan kesejahteraan masyarakat, belanja tidak bisa ditetapkan melebihi pendapatan daerah hal ini penting untuk menghindari ketidak seimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena defisit mengganggu tahun siklus anggaran yang mengakibatkan program-program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tidak tercapai, pemerintah yang baik akan menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.(Hendra Karianga, 2013:70).

2 Permasalahan yang terjadi saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Badung mengalami defisit hingga Rp 700 miliar. Kondisi ini terjadi lantaran pendapatan Badung tahun 2018 kemarin meleset. Dampaknya, banyak proyek yang molor dan ditunda. Selain itu, bantuan hibah juga banyak yang tidak cair. Menurut informasi, target pajak pada APBD induk 2018 terpasang Rp 4,9 triliun lebih. Kemudian pada APBD Perubahan dikoreksi menjadi Rp 4,1 triliun lebih. Ada 10 jenis pajak yang ditarik Bapenda Badung. Mulai pajak hotel, restaurant, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, reklame, PBB, dan BPHTB. Dari 10 jenis pajak tersebut seluruhnya tidak mencapai target. Pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 3,8 triliun lebih, pajak restaurant yang di target Rp 645,7 miliar, terealisasi hanya Rp 594,2 miliar lebih. Selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan Rp 75,7 miliar, hanya terealisasi Rp 70,9 miliar lebih. Pajak reklame realisasinya paling kecil, yakni dari target Rp 14 miliar, baru terealisasi Rp 2,3 miliar lebih. Realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 3,8 triliun lebih. Sementara penerimaan sisa lebih penggunaan anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 676 miliar lebih. Dana Silpa ini

untuk memenuhi kekurangan APBD 2018 tetapi masih tetap saja mengalami defisit. "Dari target Rp 4,1 triliun, per 20 Desember lalu tercapai Rp 3,8 triliun lebih,"(Made Sutama,2018).

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Apbn untk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu terutama meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaya,2009:129). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaa desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah (Darise,2008:38).

Menurut (Hendra Karianga, 2013:7) Realitas desentralisasi fiskal menunjukkan terjadinya kesenjangan (*fiscal gap*).

Ada dua persoalan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal yaitu:

1) Banyak daerah yang mendistribusikan alokasi anggaran untuk kepentingan aparatur tidak berimbang dengan alokasi anggaran anggaran public, teristimewa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

2) Distribusi dana perimbangan dengan para meter luas wilayah dan jumlah penduduk bukan berdasarkan pada daerah berhasil.

Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana Bagi hasil Pajak, Dana Lokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Erlina dan Rasdianto,2013:93). Dalam menggunakan dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah harus menggunakan dana itu secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Budi S,2009).

Menurut penelitian Masayu Rahma<sup>1</sup>vati tahun 2017 mengatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pemerintahan kota Bandung. Berdasarkan

koefisien dan korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan terhadap belanja daerah.

<sup>3</sup> Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan, anggaran merupakan target yang harus di capai untuk membiayai anggaran belanja (Bahtiar Arif,2009:171). Jenis pajak asli daerah yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Deddi 2012:81).

<sup>1</sup> Pada dasarnya semakin banyak kontribusi pendapatan asli daerah ini menandakan APBD, ini menandakan makin kecilnya keterkaitan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asa secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi,2014). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (Mahmudi,2009).

Permasalahan pendapatan asli daerah ini yaitu, Dari penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat jauh dari perolehan adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ditargetkan sebesar 34 milyar rupiah baru terealisasi 25 milyar dan untuk penerimaan pajak restoran ini sudah terealisasi 11 milyar 764 juta dan masih kurang sebesar 23 juta rupiah (M.Ronny,2018)

Menurut penelitian Rini Nurdini dkk tahun 2017 mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Menurut (Hendra Karianga, 2013:70) belanja tidak bisa ditetapkan melebihi pendapatan daerah hal ini penting untuk menghindari ketidak seimbangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terjadi defisit pada tahun 2016-2018 pada Kabupaten Cianjur, Kabupaten.Garut, Kabupaten.Tasikmalaya, Kabupaten.Ciamis, Kabupaten.Kuningan, Kabupaten.Cirebon, Kabupaten.Majalengka, Kabupaten.Subang Kabupaten.Sumedang, Kabupaten.Bekasi

Kabupaten.Karawang, Kabupaten.Bandung Barat, Kabupaten.Pangandaran dan juga Kota.Bandung,Kota.Cirebon,Kota.Tasikmalaya dan Kota Bekasi.

<sup>1</sup> Dana transfer atau bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Nasution,2015).

Pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan pada dana perimbangan di Kabupaten.SukaBumi, Kabupaten.Garut, kabupaten.Ciamis,Kabupaten.Kuningan, Kabupaten.Majalengka,Kabupaten.Sumedang,Kabupaten.Indramayu,Kabupaten.Bekasi Kabupaten.Bandung Barat, Kabupaten .Sukabumi, Kota.Bandung, Kota.Cirebon. Kota. Depok, Kota.Cimahi dan Kota.Banjar.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Muhamad Ahmad Yani,2012:110)

Pada tahun 2016-2018 pendapatan asli daerah yang menurun dari tahun sebelumnya di Kab.Bogor, Kab.SukaBumi, Kab.Bandung, Kab.Garut, kab.Ciamis, Kab. Kuningan, Kab.Sumedang, Kab.Indramayu, Kab.Subang, Kab. Bandung Barat, Kota.Bogor Kota.Depok dan Kota.Cimahi.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang dituliskan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Dana Perimbangan

Menurut Aries Djaenuri (2012:100)

Dana perimbangan adalah Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Indikator Dana Perimbangan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93)

1. Dana Bagi Hasil.
2. Dana Alokasi Umum.
3. Dana Alokasi Khusus.

#### 2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Damas Dwi Anggoro (2018:20) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Indikator Pendapatan asli daerah menurut Halim dan Kusufi (2012:102)

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Pajak Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-Lain PAD Yang Sah.

#### 3. Belanja Daerah

Menurut Ifa Fauziah (2018:43) Belanja daerah adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Indikator Belanja Daerah menurut Moh.Khusaini (2018:165) yaitu:

1. Belanja Langsung
2. Belanja Tidak Langsung

### B. Kerangka Pemikiran

#### 1. Dana Perimbangan Dipengaruhi Oleh Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjany (Deddi dkk,2012:48).

#### 2. Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi oleh Belanja Daerah

Semakin besar pendapatan asli daerah semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membangun didaerahnya masing-masing. Tujuan utama desentrali fiskal melalui pendapatan asli daerah adalah terciptanya kemandirian pemerinatah daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa menggalli sumber-sumber keuangan lokal (Halim,2008:258).

### C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah

H<sub>2</sub> : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) menjelaskan Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

## B. Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:30) Operasional Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variable. Berdasarkan judul penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya maka dalam penelitian ini variable Dana Perimbangan (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) sedangkan sebagai variable bebas Belanja Daerah (Y) sebagai variable dependen.

## C. Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

### 1) Populasi

Menurut Sugiyono (2017:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran di 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

### 2) Sampel

Menurut Sugiyono (2017:85) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

Sampel dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 27 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018 yaitu sebanyak 81 periode.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Analisis Deskriptif

#### 1. Analisis Deskriptif Dana Perimbangan

Pada tabel 4.2 terlihat nilai rata-rata Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2016-2018 adalah 1.629.904.999.577,90. Dana Perimbangan Terendah yaitu sebesar 77.600.947.920 yang dimiliki oleh Kota Cimahi pada tahun 2017. Sedangkan untuk Dana Perimbangan tertinggi yaitu sebesar 3.123.675.917.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung pada tahun 2018.

#### 2. Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 4.4 terlihat nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2016-2018 adalah 757.571.063.019,63. Nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terendah yaitu sebesar 66.385.348.150 yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016. Sedangkan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu sebesar 3.397.309.517.810 yang dimiliki oleh Kota Bandung pada tahun 2018.

#### 3. Analisis Deskriptif Belanja Daerah

Pada tabel 4.6 *output* SPSS diatas, terlihat nilai rata-rata belanja daerah pada Kabupaten/Kota periode 2016-2018 adalah 3.645.244.319.742.30 dengan nilai simpangan baku sebesar 5.318.212.218.588.820. Jumlah belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Cianjur 584.973.476.820, sedangkan jumlah belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu Kota Bandung sebesar 48.776.473.450.000.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian <sup>1</sup> hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah. Terdapat hubungan yang rendah dan searah antara dana perimbangan terhadap belanja daerah, dimana jika dana perimbangan naik maka belanja daerah juga akan naik, artinya semakin tinggi dana perimbangan maka kemungkinan terjadinya peningkatan belanja daerah semakin tinggi.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Deddi dkk,2012:48) dana perimbangan merupakan salah satu

komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanja<sup>5</sup>.

Penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara<sup>5</sup> na perimbangan terhadap belanja daerah yaitu sebesar 0,242 yang tergolong dalam kategori lemah. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah dana perimbangan maka akan meningkatkan belanja daerah. Besar pengaruh antara jumlah dana perimbangan terhadap belanja daerah yaitu sebesar 6% belanja daerah dipengaruhi oleh dana perimbangan, sedangkan sisanya sebesar 94% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti luas wilayah, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Kesimpulan<sup>5</sup> diatas dikatakan bahwa hasil penelitian telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi dimana fenomena yang terjadi di tahun 2016-2018 yang dimana Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada dana perimbangan tetapi belanja daerah terus meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung oleh penelitian sebelum<sup>1</sup>nya yang dilakukan oleh (Kainde,2013) Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah<sup>1</sup> meningkat. (Masayu,Catur,2017) Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

## 2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian<sup>1</sup> hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah. Terdapat hubungan yang rendah dan searah antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, dimana jika pendapatan asli daerah

naik maka belanja daerah juga akan naik, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kemungkinan terjadinya peningkatan belanja daerah semakin tinggi.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Halim,2008:258) Semakin besar pendapatan asli daerah semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membangun didaerahnya masing-masing. Tujuan utama desentrali fiskal melalui pendapatan asli daerah adalah terciptanya kemandirian pemerinatah daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa menggalli sumber-sumber keuangan lokal.

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara pendap<sup>5</sup>an asli daerah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 0,342 yang tergolong dalam kategori rendah. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja daerah. Besar pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 11,7%, artinya sebesar 11,7% belanja daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, sedangkan sisa nya sebesar 88,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti luas wilayah, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Kesimpulan<sup>5</sup> diatas dikatakan bahwa hasil penelitian telah menjawab fenomena yang terjadi, dimana fenomena yang terjadi di tahun 2016-2018 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, pendapatan asli daerah mengalami penurunan tetapi belanja daerah mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini <sup>1</sup>ndukung oleh penelitian sebelumnya Sasana (2011) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah semakin longgar alokasi belanja, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

## 3 V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis belanja daerah yang dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

periode 2016-2018 di Badan Pusat Statistik maka pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengaruh antara dana perimbangan dengan belanja daerah secara parsial berbanding lurus (bersifat positif), sehingga semakin besar dana perimbangan maka belanja daerah makin meningkat.
2. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah secara parsial berbanding lurus (bersifat positif), sehingga semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah semakin meningkat.

## B. Saran

### 1. Saran Praktis

- a. Lebih mengoptimalkan lagi dana perimbangan yang diterima dari pusat, agar dana perimbangan yang digunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat digunakan lebih efektif dan efisien.
  - b. Meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah lebih menggali sumber pendapatan asli daerah dari daerah itu sendiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola pajak yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- ### 2. Saran Akademis
- a. Bagi Perkembangan Ilmu  
Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi belanja daerah.
  - b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain dana perimbangan dan

pendapatan asli daerah, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menambah periode tahun yang akan diteliti dan menambah objek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2013. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua, Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No.71/2010. Bandung:Alfabeta
- Aries, D. 2012. Hubungan Keuangan Pusat - Daerah elemen-elemen penting hubungan keuangan pusat-daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan
- Budi, Purnomo S. 2009. Obligasi Daerah. Bandung : Alfabeta
- Darise, Nurlan 2008 Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PT. Mancanan Jaya Cemerlang
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi dan Maulida. 2012. Akuntansi Pemerintahan Jakarta: Salemba Empat
- Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Brama Ardian: Medan
- Hadi, Sasana. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 18, No. 1 : 4658)



Halim, Abdullah. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat

Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.

Hendra Karianga. 2013. *Politik Hukum Dalam Mengelola Keuangan Daerah Edisi 1* Jakarta: Kencana

<sup>1</sup> Kainde, Christian. 2013. Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Pada Kota Bitung Vol. 1, No. 3 : 393-400.

Masayu, Catur. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung Vol 1, 63-76

Moh. Khusain. 2018. Keuangan Daerah Malang: UB Press.

Made Utama. (2019, Januari 12). <sup>2</sup> Target 10 Pajak Meleset APBD Bandung Defisit 700 Miliar Lebih. Dari [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com) diakses tanggal 3 April 2019

<sup>1</sup> Nasution, Abdillah Arif. (2015). The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In Nort Sumatera Province. *European Journal Of Accounting Auditing And Finance Research*. Vol.3 No.2 PP 70-86.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Umi Narimawati. 2010. Panduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM, Jakarta: Genesis.

LAMPIRAN

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Deskriptif Dana Perimbangan**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DANA PERIMBANGAN (X1)	81	77600947920	3123675917000	1629904999577.90	680444359990.346
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 tahun 2019

**Tabel 4.4**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	81	66385348150	3397309517810	757571063019.63	733154281854.500
Valid N (listwise)	81				

**Hasil Uji Deskriptif Pendapatan Asli Daerah**

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 tahun 2019

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Deskriptif Belanja Daerah**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA DAERAH (Y)	81	584973476820	48776473450000	3645244319742.30	5318212218588.820
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 tahun 201

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas Data**

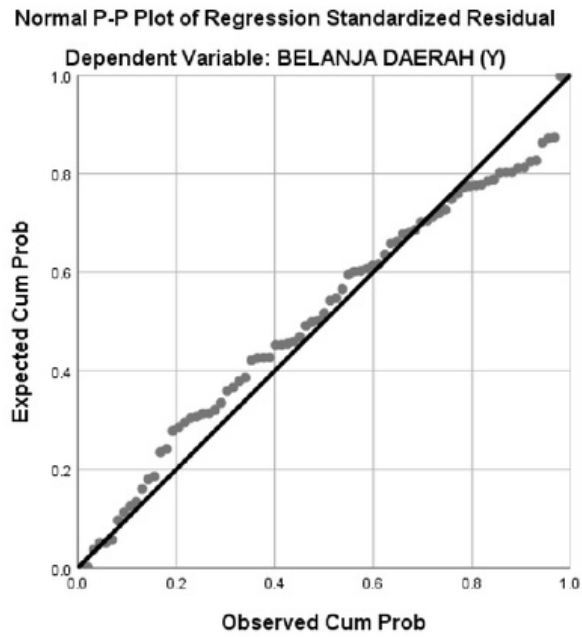
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1009.09351015
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		1.014
Asymp. Sig. (2-tailed)		.255

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25 tahun 2019



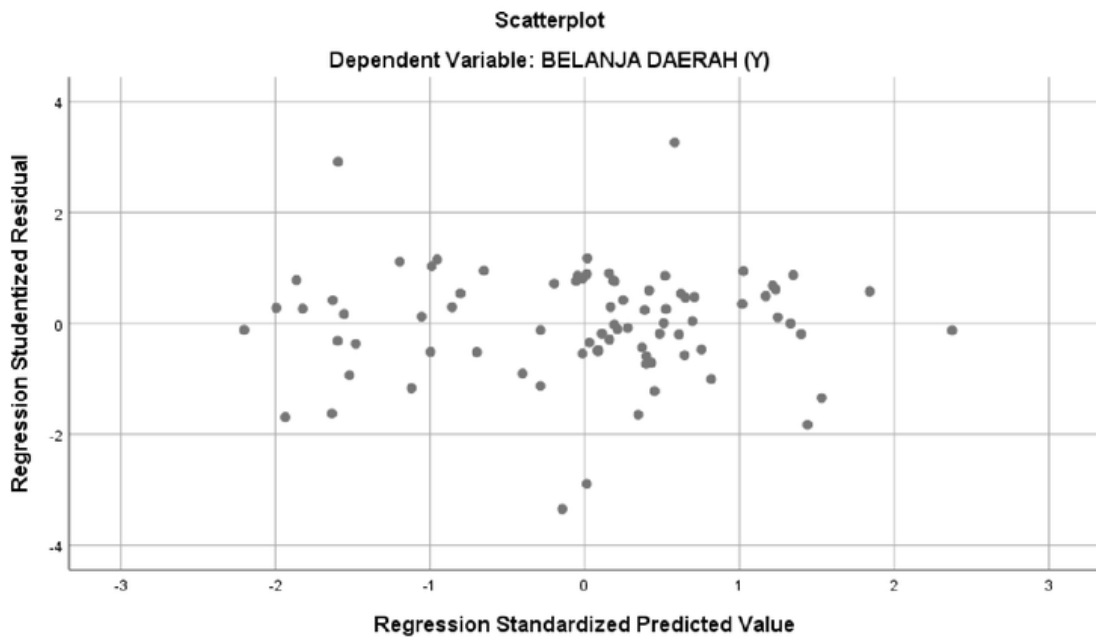
**Gambar 4.4**  
**Grafik Normalitas**

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DANA PERIMBANGAN (X1)	.795	1.258
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	.795	1.258

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y)



**Gambar 4.5**  
**Grafik Scatterplots**

**Tabel 4.9**  
**Hasil Autokorelasi**

*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.474 <sup>a</sup>	.225	.205	4742482556548.250	2.093

**Tabel 4.10**

**Persamaan Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.337	4.890		3.545	.001
1 DANA PERIMBANGAN (X1)	.893	.405	.228	2.203	.031
PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	5.248E-013	.000	.404	3.893	.000

**Tabel 4.12**  
**Koefisiensi Korelasi Dana Perimbangan Dengan Belanja Daerah**  
**Correlations**

Control Variables			DANA PERIMBANGAN (X1)	BELANJA DAERAH (Y)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	DANA PERIMBANGAN (X1)	Correlation	1.000	.242
		Significance (2-tailed)	.	.031
		df	0	78
	BELANJA DAERAH (Y)	Correlation	.242	1.000
		Significance (2-tailed)	.031	.
		df	78	0

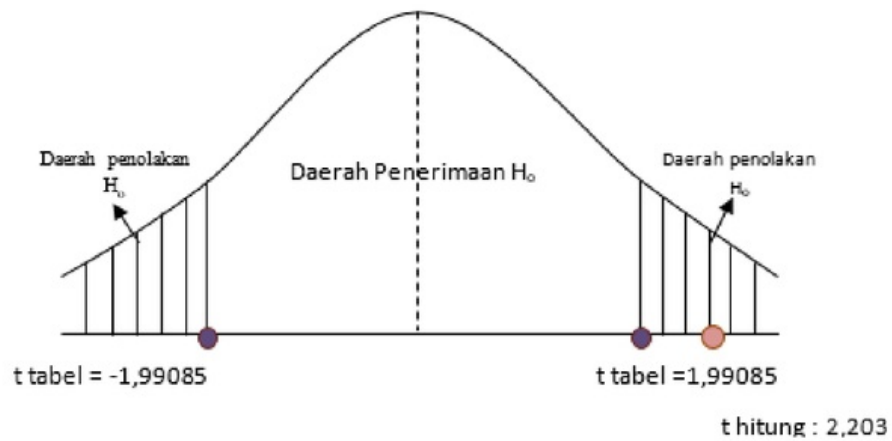
**Tabel 4.13**  
**Koefisiensi Korelasi Dana Perimbangan Dengan Belanja Daerah**  
**Correlations**

Control Variables			PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	BELANJA DAERAH (Y)
DANA PERIMBANGAN (X1)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	Correlation	1.000	.342
		Significance (2-tailed)	.	.002
		df	0	78
	BELANJA DAERAH (Y)	Correlation	.342	1.000
		Significance (2-tailed)	.002	.
		df	78	0

**Tabel 4.14**  
**Pengujian Hipotesis Parsial Dana Peimbangan Terhadap Belanja Daerah**

**Coefficients<sup>a</sup>**

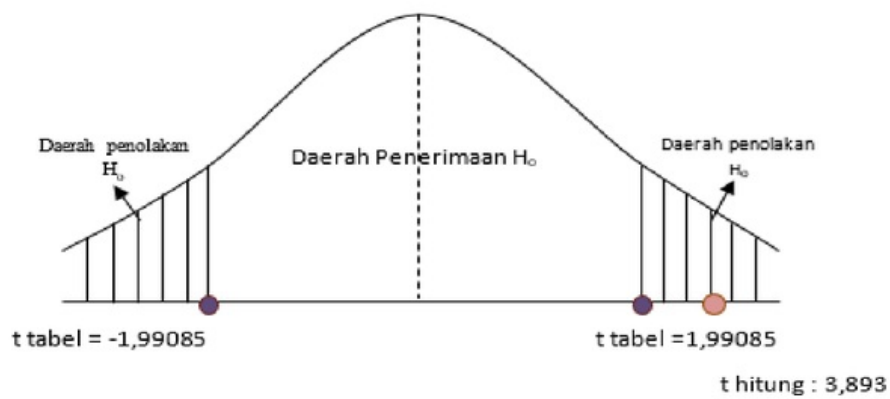
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17.337	4.890		3.545	.001
	DANA PERIMBANGAN (X1)	.893	.405	.228	2.203	.031
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	5.248E-013	.000	.404	3.893	.000



**Gambar 4.6**  
**Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Dana Peimbangan Terhadap Belanja Daerah**

**Tabel 4.15**  
**Pengujian Hipotesis Parsial Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.337	4.890		3.545	.001
1 DANA PERIMBANGAN (X1)	.893	.405	.228	2.203	.031
PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	5.248E-013	.000	.404	3.893	.000



**Gambar 4.7**  
**Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

# ANALISIS BELANJA DAERAH YANG DIPENGARUHI DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.unswagati.ac.id">jurnal.unswagati.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://radarbali.jawapos.com">radarbali.jawapos.com</a> Internet Source	6%
3	<a href="http://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://ojs.unikom.ac.id">ojs.unikom.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%